

# Pertemuan dengan KIH Tak Ada Kesepakatan

# Buya Pastikan Jokowi Tak Lantik BG

**OGYA (KR)** - Teka-teki seputar pelantikan jenderal Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri mulai terkuak. Ketua Tim 9 Buya Syafii Maarif mengatakan, Presiden Joko Widodo melalui sambungan telepon menyatakan tidak akan melantik BG.

Presiden Jokowi melantik Buya Syafii Maarif di sela Seminar Pra-Kongres Umat Islam Indonesia (KUJI) VI di kampus

terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (4/2).

Ketika dihubungi melalui sambungan telepon tersebut Buya mengira hubungan Jokowi dan Megawati yang disebutnya 'kakak-adik' sudah mencair. Sebab, sebelumnya Buya mengetahui ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan petinggi KIH yang juga ada Megawati dalam fo-

rum tersebut, Selasa (3/2).

"Saya sempat bilang selamat sudah mencair. Tapi ternyata belum dan tidak ada kesepakatan. Atas dasar moralitas publik, Presiden mengambil wewenang yang akan diumumkan pada waktu yang tepat. Tapi saya minta justru makin cepat makin baik," jelas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Buya berharap dalam kurun beberapa waktu ini tidak ada tekanan luar biasa terutama dari orang-orang yang memiliki pengaruh yang kuat, sehingga bisa mengubah keputusan tersebut. Sebab jika saja Presiden Jokowi nekat melantik BG, Buya khawatir akan ada perlakuan besar dari rakyat. "Saya melihat tidak hanya sekadar ombak. Tapi sudah gelombang yang akan menghadang," tegasnya.

Disinggung mengenai pihak-pihak yang menyayangkan komentar Buya secara terbuka di depan media, ia tidak merasa khawatir. Bahkan ia kembali menegaskan Presiden pun tidak melarang jika dirinya menyampaikan pada media.

"Kalau bangsa ini mau cerdas, apa yang perlu ditakut-

kan. Presiden saja tidak melarang. Mungkin saja disampaikan ke saya agar saya sampaikan ke media. Dalam keadaan kritis seperti ini harus mengambil posisi tegas kan nyali karena presiden dipilih rakyat," sebut Buya. Terpilih, Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga Ketua Umum MUI Pusat Din Syamsuddin menyebut

\* **Bersambung hal 7 kol 1**

## Buya Pastikan

konflik KPK-Polri ini sepenuhnya bukan domain lembaga yang dipimpinya. Namun, secara pribadi Din menegaskan seandainya presiden mengambil keputusan sesuai aspirasi terbesar yang diinginkan rakyat saat ini.

"Memang benar presiden diajukan partai. Tapi seringkali partai tidak sesuai dengan aspirasi rakyat," ucap Din.

Sedang menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, Presiden Jokowi akan memutuskan soal jadi tidaknya melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri pekan depan. Sebab, katanya, dari awal Presiden Jokowi memiliki kerangka waktu untuk memutuskan soal Komjen BG. Menurutnya, sejak awal Presiden Jokowi punya *time frame*, salah satunya adalah praperadilan. "Presiden bilang, *time frame*nya adalah praperadilan, kemudian

presiden mengatakan bisa saja diputusan sebelum atau sesudah praperadilan. Praperadilannya mundur minggu depan, dan presiden bilang mundur minggu praperadilan kan," kata Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/2).

Selain itu, tambah Andi, dalam memutuskan pelantikan Kapolri, Presiden Jokowi saat ini tengah melakukan kalkulasi politik. "Presiden bisa mengambil putusan sesuai dengan kalkulasi politik," kata Andi Widjajanto.

Saat ditanya apa yang menyebabkan Jokowi memutuskan polemik itu pada pekan depan, Andi kembali menjawab bahwa ada perhitungan yang dilakukan oleh presiden. "Ya kalkulasi politik presiden itu," katanya.

## Sambungan hal 1

Untuk melakukan keputusan tersebut, menurut Andi, Presiden sudah menerima 6 opsi, salah satunya memunculkan nama calon baru. Namun Presiden Jokowi tetap tidak akan melibatkan KPK dan PPATK Andi mengatakan, dari 6 opsi yang diajukan ke Presiden Jokowi, salah satunya yaitu tidak jadi melantik Komjen Budi Gunawan dan mengajukan nama calon baru. "Nah, untuk tahapan ini, pihak Istana tetap tidak akan melibatkan KPK seperti halnya yang dilalui oleh Komjen BG," katanya lagi. Alasannya, Presiden ingin agar sinergitas antara dua lembaga penegak hukum tersebut semakin kuat.

Sementara itu, terkait penanganan kasus BG, sebagian besar saksi dari kepolisian yang dipanggil KPK tidak datang. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, sebenarnya KPK menghimbau penegak hukum memberi contoh yang baik. "Karena itu saya yakin mereka akan datang," tegasnya di KPK Jakarta.

Disinggung soal opsi jemput paksa terhadap sejumlah saksi yang sudah beberapa kali mangkir tanpa ada keterangan, menurut Bambang, pihaknya akan berkoordinasi dengan penyidik terlebih dahulu.

(\*5/Sim/Edi/Ful)-d

"KEDAULATAN RAKYAT"

KAMIS KLIWON 5 FEBRUARI 2015 (15 BAKDAMJULUD 1948)